

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIK PADA LANJUT
USIA TERLANTAR
(STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL TRESNA
WERDHA DI KABUPATEN JOMBANG)**

Bhrahim Isnanda¹

[bhrahim Isnanda57@gmail.com¹](mailto:bhrahim Isnanda57@gmail.com)

Tukiman²

[tukiman_upnjatim@yahoo.com²](mailto:tukiman_upnjatim@yahoo.com)

UPN Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Peningkatan usia harapan hidup yang semakin membanyak akan berbenturan dengan kuantitas lanjut usia (lansia) tiap tahunnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah harapan hidup penduduk, menjadikan jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah dari setiap tahun. Fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dapat menimbulkan permasalahan global. Disisi lain kesadaran penduduk lanjut usia untuk mempersiapkan masa tuanya masih sangat relatif rendah, baik dari segi jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok, kesehatan, aksesibilitas dan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi oleh Edward III. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik dan jelas oleh para petugas dan petugas telah melaksanakan program dengan konsisten. (2) Sumber daya belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan ketersediaan staff jumlahnya masih kurang serta fasilitas pendukung yang disediakan masih kurang sehingga dalam kegiatan sehari-hari menggunakan sarana dan prasarana yang ada. (3) Disposisi telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi. (4) Struktur birokrasi belum diimplementasikan dengan baik, sehingga diperlukan perhatian yang lebih khususnya dalam penyusunan tata aliran pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik di lapangan secara rinci dan tertulis serta terdapat pembagian tanggung

jawab di dalam atau di luar Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang.

Kata kunci: implementasi, kebijakan publik, kesejahteraan, lanjut usia

ABSTRACT

The increasing life expectancy will collide with the quantity of the elderly (elderly) each year. With the increasing life expectancy of the population, the number of elderly people continues to increase from year to year. The phenomenon of the increasing number of elderly people can cause global problems. On the other hand, the awareness of the elderly population to prepare for their old age is still relatively low, both physically, spiritually, socially and economically. This condition has implications for the fulfillment of the basic rights of the elderly, especially the fulfillment of daily needs in the form of basic needs, health, accessibility and others. The purpose of this study was to find out, describe and analyze the Implementation of the Physical Needs Fulfillment Program for the Neglected Elderly in the Technical Implementation Unit of Tresna Werdha Social Services Jombang. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. This type of research uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) communication and coordination are carried out well and clearly by the officers and the officers have implemented the program consistently. (2) The resources have not been implemented properly due to the lack of staff availability and the lack of supporting facilities so that in daily activities they use existing facilities and infrastructure. (3) The disposition has been carried out well, especially in cognition, direction and response from the implementer, as well as the intensity of the response or implementation response. (4) The bureaucratic structure has not been implemented properly, so that more attention is needed, especially in the preparation of detailed and written arrangements for implementing the flow of physical needs in the field and there is a division of responsibilities within or outside the Technical Implementation Unit of Tresna Werdha Jombang Social Services.

Keywords: implementation, public policy, welfare, elderly

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, terdapat tiga sektor penting sebagai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai aparatur negara mempunyai peran utama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan kondisi yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan tugas pemerintah tersebut harus mampu memahami bagaimana menciptakan prosedur pelayanan yang maksimal.

Faktor-faktor yang mengakibatkan lansia terlantar antara lain ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan. Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga yang selama ini tinggal bersama. Ketidakmampuan ekonomi atau kemiskinan dari keluarga yang menjamin kehidupannya secara layak. Anak yang karena perkawinan harus berpisah dan mandiri serta urbanisasi yang bisa

menyebabkan lansia terlantar (Kuntjorowati 2017).

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa timur menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah lansia yang berada di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan, dari tahun 2016 dengan jumlah 1.163 jiwa, ditahun 2017 menjadi 1.200 jiwa, tahun 2018 berjumlah 1.241 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 berjumlah 1.283 dan tahun 2020 berjumlah 1.326 jiwa. Dengan demikian pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada lanjut usia sangatlah diharapkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial dikarenakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Disisi lain kesadaran penduduk lanjut usia untuk mempersiapkan masa tuanya masih sangat relatif rendah, baik dari segi jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok, kesehatan, aksesibilitas dan lainnya. Dalam pandangan kebudayaan sosial, sebagian masyarakat kita terlanjur memberi penilaian yang kurang tepat terhadap eksistensi lanjut usia, misalnya disebut sebagai manusia yang tidak produktif, tidak mandiri, menjadi beban keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dasar untuk memberikan pelayanan sosial terhadap lanjut usia menjadi

tanggung jawab negara untuk memelihara dan memberikan pelayanan sosial sesuai kebutuhan orang lanjut usia tersebut, dengan tanggung jawab sosial menimbulkan keinginan untuk mengusahakan kebahagiaan hidup bagi mereka yang menyandang keterlantaran. Lansia adalah warga masyarakat yang mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan sifat dan kondisi mereka agar mereka tidak merasa tertekan atau terbuang (Chulaifah 2015).

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki daya tampung 70 jiwa lansia yang berada di Jombang dan wilayah jauhnya berada di Kecamatan Pare yang berkapasitas 85 jiwa lansia serta bertugas di 8 wilayah kerja yaitu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, Kota Kediri. Jumlah 155 jiwa lansia ini bersifat tetap dikarenakan UPT ini di desain untuk menampung lansia berjumlah 155. Pada saat di lembaga, lansia akan diberikan pelayanan secara penuh oleh lembaga. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pemenuhan aspek makanan dan tempat tinggalnya saja namun juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Hal ini bisa dilihat melalui program-program yang dijalankan oleh

lembaga seperti bimbingan mental, fisik, psikososial, spiritual, keterampilan, kesehatan dan rekreatif.

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat (Sari 2018).

1. LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

Menurut (Ramdhani and Ramdhani 2017) terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Fredrick dalam kutipan (Muadi, MH, and Sofwani 2016) memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye dalam kutipan

(Taufiqurokhman 2014:7) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Lowi proses politik akan menghasilkan proses kebijakan dan berikutnya akan menghasilkan *outputs* yang berupa *typologies* (jenis-jenis) kebijakan (Smith and Lamier 2009). Pada bagian ini dipaparkan jenis-jenis kebijakan publik yang disebutkan oleh Theodore Lowi antara lain: *regulator policy*, *redistributive policy*, *distributive policy*, *constituent policy*.

Dalam penanganan lanjut usia terlantar pemerintah memberikan kebijakan yang bersifat *distributive policy* yakni kebijakan yang memfokuskan kepada kesamaan/kesetaraan akses dalam mengelola sumber-sumber (*resources*). Dengan demikian lanjut usia terlantar mendapatkan perlakuan yang sama terhadap lanjut usia lainnya yang harus mendapatkan pelayanan sosial

dari pemerintah di setiap daerahnya masing-masing. Selain menjadi pelayan bagi masyarakatnya pemerintah juga memiliki hak untuk mengatur rakyatnya atau memiliki *regulator policy* sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk merai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno 2014:147).

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak adalah unsur pelaksana, program yang akan dilaksanakan, dan target groups. Smith yang dikutip oleh (Tachjan 2006:26). Secara singkat yaitu sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana, dalam hal ini birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik
2. Program yang akan dilaksanakan, dalam arti kebijakan yang berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional.
3. Target groups, merupakan sekelompok orang atau organisasi

dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III ini berperspektif top-down. Menurut George C. Edward ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino 2017:137).

Kemudian Model implementasi kebijakan yang dikembangkan Merilee S. Grindle mencakup isi kebijakan tersebut, antara lain: kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; Jenis manfaat yang dihasilkan; Derajat perubahan yang diinginkan; Kedudukan pembuat kebijakan; Siapa pelaksana program; Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi; Karakteristik lembaga dan penguasa; Kepatuhan dan daya tanggap (Tresiana and Duadji 2017:54).

C. Konsep Lanjut Usia

Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yakni ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta

sistem organ. Jika ditinjau secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumberdaya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kehidupan masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat (BKKBN 2011:10).

Masa lansia adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun yang berakhir dengan kematian. Masa ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menata kembali kehidupan, masa pensiun dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial (Santrock 2006:128). Usia tua merupakan priode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu priode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari priode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat (Hurlock 1999:380).

Tidak semua lansia dapat hidup secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun banyak para lansia yang karena kondisi sosial ekonomi keluarga atau sebab-sebab lain mereka mengalami keterlantaran dalam hidupnya, terutama dalam bidang jasmani seperti terpenuhinya kebutuhan pokok serta kesehatan bagi lansia. Kemudian kebutuhan rohani

berhubungan dengan psikologi lansia dan terakhir kebutuhan sosial berhubungan dengan hubungan keluarga dan tempat tinggal (Salmah 2010:18). Dengan demikian lansia perlu untuk mendapatkan kesejahteraan sosial karena merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang mereka kembangkan kemampuannya sepeenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraanya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Rangkoly 2015).

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut (Yuwanto 2012:83) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena. Lokus penelitian ini pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Jombang dikarenakan lansia yang berada di kabupaten Jombang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dinas sosial kabupaten Jombang belum mempunyai tempat pelayanan sosial lanjut usia terlantar, sehingga dinas sosial provinsi Jawa Timur membangun Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha

untuk melakukan penanganan dan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar.

Kemudian fokus penelitian ini yakni batasan lansia terlantar yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang tidak memperoleh penghasilan dan tidak dapat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri yang dianalisis menggunakan teori model implementasi Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara 2014:250) bahwa dalam melihat implementasi kebijakan dengan empat variabel yang dapat dijadikan fokus keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Sumber data adalah tempat dimana peneliti menemukan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk penunjang penelitian. Serta tujuan adanya sumber data dalam penelitian yaitu sebagai subjek tempat data diperoleh. Hal ini dapat dibuktikan dari penjelasan (Kuswana 2011:64) yang menjelaskan bahwa sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen, dan sebagainya.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang,
- b. Petugas UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang,
- c. Lanjut usia terlantar sebagai masyarakat yang mendapatkan

pelayanan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui tangan kedua atau secara tidak langsung. Data ini dapat berupa dokumen, laporan dan arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis yang dikembangkan oleh (Miles and Huberman 2014:33) yaitu analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik lanjut usia terlantar pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang maka dapat diuraikan hasil wawancara dengan teori model implementasi Edward III dengan 4 fokus yang dijabarkan dibawah ini.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh pada kelompok sasaran kebijakan dan petugas implementor kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan yang efektif dapat terlaksana apabila para implementor sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Oleh karena itu

komunikasi ini sangat dibutuhkan agar para implementor kebijakan dan pembuat keputusan semakin konsisten dalam pelaksanaan kebijakan di lingkungan masyarakat. Komunikasi memiliki 3 sub fokus, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang diuraikan sebagai berikut.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa proses penyaluran komunikasi dan koordinasi dalam program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang telah memuat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi dari UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota di batas wilayahnya yaitu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, Kota Kediri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi telah ditransmisikan dengan baik.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa kejelasan dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia yang dilakukan oleh petugas UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang melalui kegiatan

sehari-harinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, dengan demikian petugas lebih memahami tentang kebijakan tersebut dengan tepat dan jelas, sehingga para lanjut usia di dalam panti dapat memahami dengan jelas mengenai program pemenuhan kebutuhan fisik.

c. Konsistensi

Dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa dalam koordinasi antara UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sudah konsisten, di dalam panti semua petugas melaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan lanjut usia terlantar langsung diarahkan ke panti sosial padahal klien tidak memenuhi syarat seperti tidak bisa beraktifitas layaknya lansia pada umumnya dan ada permasalahan lain seperti masih mempunyai keluarga dan tidak mengetahuinya bahwa orang tuanya terlantar. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan petugas konsisten.

2. Sumber Daya

Selain ditentukan oleh komunikasi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Maka dalam mengimplementasikan program pemenuhan kebutuhan fisik diperlukan sumber daya sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun didalam penelitian ini yang dimaksud sebagai sumber daya yaitu staff, informasi, kewenangan, fasilitas yang

diuraikan sebagai berikut:

a. Staff

Dari hasil wawancara dapat diuraikan dengan jangkauan di delapan wilayah yaitu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, Kota Kediri, bahwa petugas implementor program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia dalam jumlahnya masih kurang dikarenakan tidak hanya fokus pada satu kantor, melainkan dibagi dengan wilayah jauhnya yang berada di Kecamatan Pare dengan jumlah 155 lansia yang dirinci 85 lansia berada di Pare dan 70 lansia berada di Jombang dengan jumlah petugas 40 orang. Kemudian jika dilihat dari kemampuan para petugas tersebut sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik walaupun jumlah petugas belum maksimal.

b. Informasi

Dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa peraturan mengenai program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia merupakan pedoman bagi petugas dalam melakukan pelaksanaannya yakni peraturan gubernur nomor 108 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas sosial propinsi jawa timur pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan sesuai petunjuk dan teknis program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia di lapangan dilakukan secara teknis melalui pengaduan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui TKSK (Tenaga Kerja Sektor Kecamatan). Maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam sumber daya telah memiliki pedoman peraturan dan telah dilakukan koordinasi dengan tenaga kerja sektor kecamatan sebagai petunjuk teknis di lapangan terkait program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia terlantar.

c. Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa kewenangan yang dimiliki petugas terkait pemenuhan kebutuhan fisik di dalam panti yakni menutamakan gizi klien dengan menjaga kesehatannya seperti senam lansia atau senam ringan. Kemudian jika berkaitan dengan aktifitas sehari-hari petugas tidak memaksakan klien supaya semuanya beraktifitas melainkan apabila ada yang tidak bisa beraktifitas sama sekali seperti tidak dapat berjalan, tidak dapat mandi sendiri bahkan bergerak tidak bisa petugas berkewenangan menyiapkan kebutuhan fisiknya seperti makan, obat-obatan dan lain-lain. Selanjutnya terkait kewenangan dengan pihak luar seperti dinas sosial kabupaten/kota yang menginginkan klien menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang,

padahal klien tersebut tidak memenuhi syarat baik dari segi fisik maupun psikis sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kewenangan penanganan lansia yang terdapat di sekitar wilayah dinas sosial kabupaten/kota tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam program pemenuhan kebutuhan fisik lanjut usia terlantar pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang telah dimiliki oleh petugas.

d. Fasilitas

Dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa fasilitas yang disediakan oleh petugas dengan tujuan program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia masih kurang sehingga dalam kegiatan sehari-hari menggunakan sarana dan prasarana yang ada di dalam UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang telah disediakan oleh petugas UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang belum maksimal.

3. Disposisi

Disposisi adalah Sikap dan komitmen pelaksana program atau kebijakan yang diimplementasikan karena program atau kebijakan membutuhkan implementor yang memiliki keinginan yang kuat dan komitmen yang tinggi supaya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia

terlantar didukung oleh sikap petugas didalam pelaksanaannya. Disposisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini antara lain kognisi, arahan dan tanggapan kebijakan, serta tanggapan pelaksana atau intensitas respon yang akan dijabarkan lebih jelas dibawah ini.

a. Kognisi

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diuraikan bahwa petugas pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia telah memahami ketentuan-ketentuan dalam program pemenuhan kebutuhan fisik. Karena lansia juga akan melapor apabila ada petugas yang menyepelkan lansia tersebut, di dalam panti juga dibagi menjadi 5 wisma dan disetiap wisma terdapat penanggung jawab masing-masing. Jadi apabila ada petugas yang memberikan pelayanan kurang maksimal, petugas yang lain saling membantu dan klien bisa melaporkannya ke petugas lain. Secara tidak langsung petugas telah memahami ketentuan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia. Maka dapat disimpulkan bahwa disposisi sub fokus kognisi sudah diimplementasikan dengan baik.

b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa petugas pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia yang ditunjukkan yakni tanpa adanya penolakan atau resistensi dari petugas atas arahan tersebut. Dapat dilihat dari arahan kepala UPT

Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang yaitu menutamakan fungsi keluarga. Jika sudah tidak memiliki keluarga ataupun keluarga yang ditinggalinya memiliki kesulitan ekonomi, akhirnya tidak mampu untuk merawat lansia tersebut maka akan diarahkan ke panti sosial untuk dilakukan pemenuhan kebutuhannya dengan memenuhi kriteria yang ada. Kemudian berkaitan dengan keadilan petugas dalam melaksanakan program pemenuhan kebutuhan fisik sudah adil dalam pelaksanaannya karena menganggap klien yang dilayani merupakan keluarga sendiri bagi petugas. Maka dapat disimpulkan bahwa sub fokus arahan dan tanggapan pelaksana dalam disposisi telah dilakukan tanpa adanya penolakan atau resistensi dari petugas pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia.

c. Intensitas Respon atau Tanggapan Pelaksanaan

Dari uraian hasil wawancara dapat diketahui bahwa petugas telah melaksanakan dan merespon program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia secara intens dan terus-menerus. Hal tersebut dapat diketahui pada waktu pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan fisik yang dilakukan setiap hari, jika hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan makan, maka terdapat petugas masaknya yang mempunyai keahlian dalam hal masak memasak. Namun jika berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan juga

terdapat petugas alumni Stikes artinya memahami tentang memberikan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti mandi dan pada waktu itu klien tidak bisa maka petugas akan datang dan melaksanakan pelayanan. Maka dapat disimpulkan bahwa sub fokus intensitas respon dan tanggapan pelaksana dalam disposisi telah direspon petugas dengan intens dan terus menerus.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan.

Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien (Widodo 2013:106).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa struktur pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang tertulis secara umum bahwa pelaksana dan penanggung jawab program oleh Kepala UPT, Kepala TU, Kepala Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut, Kepala Seksi Pelayanan Sosial. Kemudian berkaitan dengan pembagian tanggung jawab kerja di dalam dan di luar UPT Pelayanan Sosial Tresna

Werdha Jombang tidak terdapat pembagian. Pelaksanaan tanggung jawab kerja di lapangan disamakan atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus struktur birokrasi belum diimplementasikan dengan baik dalam program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi pada implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dapat dinyatakan diimplementasikan dengan baik pada semua sub fokus transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dapat dibuktikan terdapat transmisi komunikasi dari UPT kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta terdapat pentransmisi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada lansia terlantar di wilayah kerjanya. Kemudian komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik dan jelas oleh para petugas dan petugas telah melaksanakan program dengan

- konsisten.
2. Sumber daya pada implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dapat dinyatakan belum diimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pedoman peraturan dan petunjuk teknis serta terdapat kewenangan yang dimiliki petugas, namun ketersediaan staff dalam program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia jumlahnya masih kurang walaupun petugas tersebut sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan program dengan baik serta fasilitas pendukung yang disediakan oleh petugas masih kurang sehingga dalam kegiatan sehari-hari menggunakan sarana dan prasarana yang ada.
 3. Disposisi dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang telah diimplementasikan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan pengertian atau pemahaman petugas mengenai ketentuan-ketentuan program pemenuhan kebutuhan fisik dan tidak adanya penolakan atau resistensi dari petugas terhadap program pemenuhan kebutuhan fisik, serta terdapat intensitas respon secara terus menerus oleh petugas dalam

- melaksanakan program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dapat dikatakan belum diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian diperlukan perhatian yang lebih pada fokus struktur birokrasi khususnya dalam penyusunan tata aliran pelaksana program pemenuhan kebutuhan fisik di lapangan secara rinci dan tertulis serta terdapat pembagian tanggung jawab di dalam atau di luar Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang.

5. Dengan demikian implementasi program pemenuhan kebutuhan fisik pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang belum diimplementasikan dengan baik secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena ketersediaan staff jumlahnya masih kurang, dan fasilitas pendukung yang disediakan oleh petugas juga masih kurang sehingga dalam kegiatan sehari-hari menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta struktur birokrasi tidak terdapat pembagian tanggung jawab yang tertulis secara rinci di dalam atau di luar Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang.

2. Meningkatkan fasilitas pendukung

6. SARAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagaiberikut:

1. Meningkatkan rekrutmen calon pegawai dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah setempat. Dikarenakan jangkauan wilayah kerjanya sangat luas di delapan wilayah antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, Kota Kediri.

yang disediakan oleh petugas, sehingga menjadikan pendukung bagi lansia untuk melatih keterampilan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

3. Diperlukan adanya tata aliran pelaksana secara fragmentasi terkait tanggung jawab petugas mengenai program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab dari instansi terkait program pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia terlantar.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- BKKBN. 2011. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik.
- Chulaifah, Siti Aminatun dan. 2015. "Peran Pekerja Sosial Dalam Memberi Pelayanan Lanjut Usia." *Jurnal PKS* 14(1):107–22.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi Keli. Jakarta: Erlangga.

Kuntjorowati, Elly. 2017. "Nyaman Dan

Tentram Di Rumah Pelayanan Lanjut Usia.” *Jurnal PKS* 16(2):209–22.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edition 3. United States of America: SAGE Publication.

Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. 2016. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Review Politik* 6(2):195–224.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 11(1):1–12. doi: 10.1109/ICMENS.2005.96.

Rangkoly, Ivo. 2015. “Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Bara.” *Jurnal Administrasi Publik* 3(12):39–50.

Salmah. 2010. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC.

Santrock. 2006. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.

Sari, Meri Enita Puspita. 2018. “Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik.” *Jurnal Trias Politika* 2(1):1–12.

Smith, K. ..., and Christoper W. Lamier. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Vol. 9. Westview Press.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan*

Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tresiana, Novita, and Noverman Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pengembangan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Widodo. 2013. *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuwanto, Listyo. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Eksperimen*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.